Istilah globalisasi didefinisikan oleh berbagai pakar, antara lain oleh Robertson sebagai proses "krystalisasi dari keseluruhan dunia sebagai satu tempat yang tunggal" dengan konsekuen wensi berupa kemunculan suatu kondisi manusia yang global pula. Hal ini juga berarti meluasnya wawasan serta lingkup kerja sampai kecapai seluruh wilayah dan populasi dunia.


Teknologi komunikasi dengan dukungan teknologi komputer telah melahirkan satelit komunikasi yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan disamping untuk telekomunikasi, antara lain untuk kepentingan penyaluran siaran radio dan televisi.

Perkembangan teknologi komunikasi ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi dan menyimpan serta mendapatkan informasi. Kemudahan tersebut lebih didorong lagi oleh perkembangan teknologi informasi yang telah membawa perubahan dahsyat dalam proses pengolahan, penyimpanan, distribusi data dan informasi. Data dan informasi telah dapat disimpan dan dikomunikasikan dalam jumlah hampir tak terbatas dalam waktu yang sangat cepat.

Penggunaan satelit komunikasi telah menimbulkan adanya interdependensi secara global. Memasuki dasawarsa 70-an saja, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi tersebut ternyata telah melimpah ke berbagai negara berkembang, termasuk kawasan Asia-Pasifik.


Dengan perkembangan teknologi yang diuraikan di atas maka diperkirakan dalam kurun waktu PJP II terjadi kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut:

- Transformasi menuju masyarakat informasi akan terjadi semakin cepat dan semakin meluas. Informasi akan semakin menjadi komoditi strategis sehingga siapa yang menguasai informasi akan mampu memanfaatkannya secara berdaya guna akan semakin maju.

- Penggunaan teknologi Integrasi Jasa Informasi (lazim disebut Integrated Service Digital Network atau ISDN) akan semakin meluas yang akan mempengaruhi teknologi sistem transmisi, sistem switching dan peralatan terminal. Oleh sebab itu interkoneksi global untuk setiap negara pengguna jasa informasi dimungkinkan dan harus menjadi perhatian khusus.

- Integrasi telekomunikasi dan komputer akan semakin merupakan kenyataan. Dengan demikian batas antara public network dan private network akan semakin kabur dan sulit dikontrol. Berbagai jasa baru akan bermunculan yang semuanya akan memer-
lukan modus transmisi yang baru, perangkat lunak dan peralatan terminal yang baru.

- Value added services (jasa nilai tambah) seperti banking system, travel system lain-lain akan semakin berkembang disertai dengan masalah-masalah inter-connectivity yang harus dipecahkan tanpa menghilangkan sifat khusus dari sistem-sistem tersebut.

- Spektrum pemanfaatan teknologi komunikasi serat optik akan semakin meluas disertai dengan kapasitas yang semakin tinggi dalam kemampuan menyalurkan data, suara dan video sehingga akan ikut mengubah sistem distribusi penyaluran informasi, serta menciptakan “global information Highway”. yang sekarang dikembangkan terus menjadi informasi super highway dengan kapasitas yang lebih tinggi lagi serta service yang lebih meningkat.

- Gaya hidup canggih akan mulai berkembang, antara lain kerja jarak jauh, berbelanja jarak jauh bahkan belajar jarak jauh akan semakin meluas.

- Struktur komunikasi akan semakin multidimensi, lebih berkembang ke arah horizontal dan diagonal.

Perkembangan Teknologi Informasi

Di dalam sejarah peradaban manusia, beberapa ahli komunikasi telah banyak menyampaikan teori yang berkaitan erat dengan masalah pentingnya "Energi, Pangan dan Informasi" sebagai tiga unsur utama yang menentukan tingkat peradaban manusia. Dari ketiga unsur tersebut selama ini telah banyak dibicarakan dengan melihat kenyataan bahwa dunia telah menghadapi kekhawatiran terhadap masalah krisis energi, krisis pangan dan berikutnya apa kah mungkin kita akan menghadapi krisis informasi? Dalam hubungan ini secara khusus kita perlu melakukan pendekatan terhadap pentingnya masalah produk informasi ini.


Bercicara tentang "The Concept of the Corporation", Peter Drucker menyebutkan bahwa produk pengetahuan yang dihasilkan melalui teknologi informasi telah menjadi industri yang utama dan mampu memenuhi kebutuhan yang paling pokok dalam bidang ekonomi serta sumber-sumber daya lainnya. Dalam sistem ekonomi informasi, berkembangnya nilai bukanlah ditentukan oleh buruh tetapi oleh pengetahuan. Gelombang masyarakat informasi dipengaruhi
oleh proses pebedaan waktu. Proses perubahan dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri memerlukan waktu 100 tahun, sedangkan perubahan masyarakat industri ke masyarakat informasi hanya memerlukan waktu dua dekade saja. Perubahan berjalan sedemikian cepatnya sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk bereaksi dan sebagai akibatnya kita dituntut secara terus-menerus berantisisipasi terhadap masa depan.

Tidaklah mengherankan apabila kita selalu menghadapi kenyataan untuk menganggap sesuatu jenis peralatan yang dilihat menerusi pada saat ini, pada tahun berikutnya telah berubah dan lahir produk terbaru untuk memenuhi peralatan yang sama dengan kemampuan yang secara kualitatif lebih menguntungkan.

Dalam masyarakat informasi, orientasi waktu adalah ke masa depan. Kita harus belajar dari pengalaman yang berlangsung saat ini untuk berantisisipasi terhadap masa yang akan datang. Kalau kita mampu melakukan, akan berarti kita mampu untuk "belajar dari masa depan" sebagaimana kita mempelajari masa lalu.


Perubahan menuju periode masyarakat informasi makin dipercepat oleh penemuan-penemuan teknologi komunikasi. Saluran utama dalam era informasi adalah komunikasi. Dalam urusan sederhana, komunikasi memerlukan pengirim, penerima dan saluran komunikasi. Penemuan-penemuan teknologi modern telah menyebabkan perubahan besar-kesarahan dalam proses komunikasi yang sederhana tersebut. Proses yang nyata adalah waktu yang diperlukan untuk menyampaikan informasi melalui saluran teknologi modern jauh lebih singkat, seolah-olah jarak antar pengirim dan penerima diperpendek, atau sering pula yang disebut "collapsing the information float".

Apabila di waktu-waktu yang lalu kita perlu dua atau tiga hari untuk mengirimkan surat, maka kini kita dapat mentransfer pesan atau data hanya dalam beberapa detik saja melalui peralatan komputer atau "surat elektronik". Kenyataan ini menunjukkan gejala menuju sasaran masyarakat informasi yakni tingkat masyarakat yang sebagian besar kehidupannya digerakkan oleh lalu lintas yang akurat dan cepat, sehingga membentuk masyarakat yang sebagian hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari produk informasi.

Kondisi masyarakat serupa itu diperkuat pula dengan penemuan teknologi komputer yang memproses data dan penggunaan satelit yang mampu menerima dan mengirimkan data tanpa mengenal jarak dan waktu atau yang kerap kali disebut "Computation".

Prof. Dr. Everett M. Rogers, Guru besar pada universitas Stanford California mengatakan, negara berkembang bisa dan telah memanfaatkan era masyarakat informasi dengan beberapa cara. Salah satu cara diantaranya dengan memanfaatkan sistem komunikasi modern, termasuk penggunaan teknologi satelit. Hal tersebut telah menjadi kenyataan di negara, kita.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya peningkatan peranan serta perkembangannya teknologi komunikasi dan informasi terutama terjadi berkat peningkatan terintegrasi teknologi komputer dan telekomunikasi. Peralatan komputer yang semula hanya dapat dioperasikan secara individual, berkembang menjadi komputer yang dapat saling berkomunikasi jarak jauh. Integrasi teknologi komputer dan telekomunikasi pada gilirannya mendorong terjadinya konvergensi antara teknologi media informasi massa elektronik dengan teknologi media informasi data. Konvergensi ini kemudian mengakui dunia perdagangan dan industri dengan informasi massa elektronik.

Hal ini dapat dimengerti, karena baik dunia industri dan perdagangan maupun media informasi massa elektronika semakin bertumpu pada pemanfaatan jasa dan teknologi media data. Perkembangan ini membawa media informasi elektronika menjadi industri multi nasional. Salah satu implikasinya adalah hal inilah semula media massa elektronika membuat disain penyiarannya semata-mata untuk kepentingan nasional, maka media massa transnasional mendisain penyiarannya untuk kepentingan program multi nasional. Kalau semula siaran melalui satelit ditujukan terutama ke dalam negeri, meskipun sering meluber ke negara lain, maka pada era media massa elektronika transnasional, siaran melalui satelit tidak hanya meluber, tetapi memang diarahkan secara multi nasional. Dampak lainnya adalah semakin bersifat komersialnya komoditi informasi yang disajikan.

Pada awal dekade 70-an, mulai berkembang pertentangan pendapat antar negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dalam masalah penentuan hukum internasional yang berkaitan dengan rencana peluncuran Satelit DBS (Direct Broadcasting Satellite atau Satelit Siaran Langsung) pada dekade 80-an. Berdasarkan prinsip menghormati kedaulatan negara atas ruang udara nasionalnya, negara-negara berkembang mengusulkan agar negara-negara yang memiliki DBS diwajibkan memperoleh "prior consent" (persetujuan sebelumnya) dari negara-negara yang ikut terlibut oleh sinyal-sinyal/program-program berasal dari DBS. Tetapi negara-negara maju menolak usul ini, karena dianggap bertentangan dengan prinsip "free flow of information".


Pada tahun 1973 Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara Dunia Ketiga di Aljazair telah

BESTARI, AGUSTUS - DESEMBER 1995


Hal ini perlu memperoleh perhatian guna melindungi integritas budaya negara Dunia Ketiga dari "serbu" bersifat negatif yang dibawa oleh arus pemberitaan/program-program dari negara-negara maju yang membawa nilai-nilai yang kurang sesuai dengan keadaan setempat.


**Ketahanan Nasional dan Ketahanan Budaya**

Ruang udara nasional sebagai salah satu dimensi wilayah, merupakan aset pembangunan yang dirasakan semakin penting, juga bagi sistem Penerangan Nasional. Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan posisi strategis Indonesia yang terletak pada posisi silang lalu lintas dunia. Oleh karena itu Departemen Penerangan sejak lama telah berupaya memfokuskan secara optimal, misalnya dengan memanfaatkan jasa satelit Palapa yang diorbitkan pada tahun 1976. Sejak diorbitkannya satelit Palapa tersebut, Departemen Penerangan melihat adanya peluang untuk menjadah seluruh wilayah nusantara...
melalui pengembangan jaringan siaran radio
dan televisi secara tepat, merata dengan biaya
yang relatif murah dan mutu teknis yang tinggi.

Dengan semakin majunya teknologi komun-
nikasi, maka pada masa mendatang Indonesia
akan pula memasuki era cetak jarak jauh. Juga
dalam mengembangkan peranan penerangan ta-
tap muka yang masih tetap akan diperlukan di
masa depan, jaringan komunikasi komputer
pasti akan dimanfaatkan pula oleh Departemen
Penerangan. Studi ke arah tersebut telah mulai
dilakukan.

Keputusan menggunakan jasa satelit Palapa
untuk mempercepat pemerataan ke seluruh nu-
santara, tidak diragukan lagi merupakan kepu-
tusan dan pemilihan teknologi yang tepat. Pe-
satnya teknologi komunikasi juga membawa
dampak-dampak baru. Pada saat Indonesia pada
1983 masih mempersoalkan apakah kita akan
menggunakan Direct Broadcasting Satellite
(DBS) atau tidak, teknologi komunikasi telah
sedemikian majunya, sehingga siaran-siaran
melalui satelit komunikasi "biasa" atau "non
DBS" pun sudah dapat diterima secara langsung
oleh pesawat televisi di rumah-rumah. Sehing-
ga meskipun secara teoritis kita hanya mem-
buka udara kita terhadap siaran-siaran dalam
dan luar negeri yang disiaran melalui Palapa,
secara praktis kita juga telah membuka Ruang
Udara Nasional kita bagi semua siaran yang
dipancarkan oleh satelit-satelit lain, baik siaran-
siaran yang merupakan "spillover" maupun yang
secara sengaja diarahkan pada Indonesia.

Hal ini berarti secara praktis kita menerima
penerapan prinsip "Free Flow of Information"
dengan segala dampak positif maupun negatif-
nya bagi semua aspek kehidupan bangsa. De-
gen demikian masalah pemupukan Ketahanan
Nasional pada umumnya dan ketahanan budaya
pada khususnya menjadi hal yang amat penting.
Lebih-lebih kita ketahui bahwa pada dewasa ini
di kalangan Asia Pasifik beredar dan beroperasi
berbagai macam satelit, baik satelit komunikasi
maupun satelit siaran langsung/DBS (Jepang),
baik dengan daerah jangkauan regional maupun
destistik.

Dampak Globalisasi dan Pemecahan
Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan
informasi yang sangat pesat yang membawa
akibat semakin derasnya arus globalisasi infor-
masi melanda tanah air kita tidak dapat kita
cegah. Bagi masyarakat Indonesia proses glo-
balisasi ini dapat berakibat positif dan negatif.
Yang amat penting untuk diwaspadai adalah
dampaknya di bidang sosial budaya. Pecahnya
bangsa-bangsa menjadi kelompok-kelompok
etnis karena dorongan ekonomi global, merupakan
ancaman yang fatal bagi kelangsungan hidup
bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia.

Untuk menghadapi hal ini kita harus mene-
rakkan kebijaksanaan dan strategi yang pada
prinsipnya mengarah pada upaya memperko-
koh ketahanan sosial budaya bangsa.

Ketahanan sosial budaya merupakan salah
satu kunci, baik bagi keberhasilan secara me-
nyeluruh maupun sebagai sasaran pembangun-
nan sumber daya manusia. Bidang sosial bu-
daya merupakan sumber sekaligus muara pembangunan nasional serta ketahanan nasional.
Ketahanan sosial budaya akan terwujud melalui
pembangunan sosial budaya yang harus men-
yentuh dimensi nilai-nilai kultural dan insti-
tusi kemasyarakatan yang bersifat fungsional,
struktural dan kewilayahan. Melalui pembangun-
nan sosial budaya kita ciptakan segala bentuk
keuletan dan ketangguhan budaya dalamarti
luas sebagai unsur-unsur ketahanan sosial
budaya.

Kualitas ketahanan sosial budaya itu lah
yang harus menjawab apakah di dalam meng-
hadapi gelombang globalisasi ekonomi dan globalisasi sosial budaya, kita akan sedikit menjadi objek permainan atauah kita tumbuh sebagai objek pelaku yang kreatif, produktif dan karena itu terhormat.

Ketahanan sosial budaya itualah yang akan menentukan apakah kita akan menjadi bangsa yang merdeka yang memiliki jati diri, bersatu, berdaulat, maju dan mandiri ataukah kita akan menjadi bangsa yang terpesah-pecah, terkurasai oleh kekuatan lain sehingga sekedar menjadi sistem dari kekuatan ideologi lain tersebut.

Semua itu mengisyaratkan betapa upaya menciptakan ketahanan sosial budaya dengan membungkun keuletan dan ketangguhan sosial budaya merupakan medan yang harus menjadi perhatian kita dan sekaligus juga medan yang tidak ringan. Ini hanya dapat terjadi apabila kita membuat amanat pembukaan UUD 1945 itu menjadi keputusan dan tekad kita bersama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jalan membangun dan meningkatkan kualitas kecerdasan dan kualitas kesejahteraan manusia dan masyarakat Indonesia.


Jika dianalisa mengapa negara-negara di atas bisa berkembang dengan pesat, faktor yang menentukan adalah akselerasi pengembangan sumber daya manusia negara tersebut berjalan dengan baik.

Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu masalah yang amat kompleks, mencakup aspek pendidikan, pelatihan serta pemanfaatan tenaga manusia dalam perkembangan ekonomi dan sosial budaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Muhammadiyah yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi diharapkan dapat berperan lebih banyak lagi dalam upaya pengembangan sumber daya manusia tersebut. Menguatkan bangsa kita dalam dekade mendatang dihadapkan kepada berbagai tantangan yang lebih besar baik tantangan yang bersifat nasional, regional maupun tantangan yang bersifat global, diantaranya adalah derasnya arus informasi menjangkau seluruh pelosok dunia khususnya tanah air kita.

Setelah memahami masalah yang berkaitan dengan globalisasi informasi, maka Departemen Penerangan menetapkan kebijaksanaan dan strategi sebagai berikut : 1. Indonesia memanfaatkan secara oris dan bijaksana kemajuan-kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi.

Dalam era kebangkitan nasional II, kita bertekad untuk mengejar ketinggalan kita selama ini dan melakukan segala upaya untuk dapat berdiri sejajar dengan bangsa maju lainnya. Untuk mencepakan maksud tersebut kita mengembangkan konsep kemandirian, yaitu konsep kebangsaan yang diperkaya dengan dimensi-dimensi baru, antara lain dimensi penguasaan Iptek dan Ekonomi.

Sesuai dengan konsep tersebut, maka Departemen Penerangan memanfaatkan secara
arif dan bijaksana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan mengarahkan penempakan bagi kepentingan nasional termasuk kepentingan pendidikan nasional.

2. Indonesia menganut kebijaksanaan "Open Sky Policy" terkendali.

Sesuai dengan wawasan nasutara serta sehaluan dengan prinsip yang dianut negara-negara berkembang, maka kita memandang bahwa pemanfaatan wilayah darat dan ruang udara nasional di Indonesia untuk kepentingan Penerangan Nasional merupakan hak dan kewenangan pemeringh. Karena itu kita menganut prinsip "Open Sky Policy" terkendali dan memegang teguh prinsip "Prior Consent".

Dalam rangka kebijaksanaan tersebut Departemen Penerangan atas nama pemeringh mengambil langkah-langkah "Law Enforcement" yang diperlukan untuk menjamin agar kebijaksanaan pemeringh tersebut berjalan dengan baik. Langkah-langkah tersebut antara lain berbentuk pengeluaran produk-produk hukum dan peraturan-peraturan yang dapat menjamin tegaknya dan terlaksananya hak dan kewenangan pemeringh sebagai satu-satunya pengambil keputusan dalam pemanfaatan wilayah darat dan ruang udara nasional bagi kepentingan Penerangan Nasional, meliputi aspek-aspek perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia.

Dalam batas-batas tertentu pemeringh dapat menunjuk pihak lain dari masyarakat maupun swasta nasional untuk ikut serta melaksanakan tugas-tugas penerangan (dalam bentuk misalnya, pelayanan penyiaran kepada masyarakat atau industri penyiaran dengan bahan penyiarannya yang merefleksikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.


Dalam sistem penyiaran televisi transnasional di Indonesia sedikitnya ada dua macam model penyiaran yaitu:

- Program siaran televisi transnasional dipancarkan dari negara asing melalui satelit Palapa sehingga dapat diterima di seluruh daerah yang jangkauan satelit Palapa termasuk di Indonesia, tetapi lembaga penyiaran televisi transnasional sepenuhnya berada di luar negeri, atau

- Lembaga penyiaran televisi transnasional atau salah satu sub sistemnya berada di Indonesia.

Dalam menentukan sikap terhadap dua macam model operasi tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu antara lain:


- Kita dapat menyetujui penyelenggaraan siaran transnasional yang juga menjangkau Indonesia selama Lembaga Penyiaran Televisi tersebut sepenuhnya beroperasi di luar negeri. Persetujuan kita karena kita menga-nut sistem "Prior Consent". Dengan tetap beroperasinya Lembaga Penyiaran Televisi transnasional di luar negeri, maka berarti sistem Penerangan Nasional kita tetap ber-ada pada dalam kondisi "solid". Dampak negatif dari siaran transnasional dapat de-ngan mantap kita redam sesuai konsep Ketahan Budaya yang harus terus-menerus dipupuk.

- Namun bila ada sub sistem dari Lembaga Penyiaran transnasional berada di Indone-


Dengan tetap menerapkan prinsip kerjasama internasional kita memelihara tegaknya prinsip ketahanan nasional atas wilayah daratan dan ruang udara nasional kita. Penerapan kebijaksanaan ini diarahkan untuk menciptakan landasan bagi tumbuhnya ketahanan budaya dan mental bangsa kita dalam menghadapi arus globalisasi informasi/free flow of information.

Dalam rangka peningkatan ketahanan budaya ada beberapa kenyataan dan pemikiran yang perlu diperhatikan:

- Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari sejumlah suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan/agama/kepercayaan dan sejarah dan tingkat kehidupan yang berbeda-beda. Masyarakat yang majemuk ini sedang mengalami pergesaan sistem nilai sebagai akibat pembangunan, yang pada hakekatnya merupakan proses pembauran di segala sektor kehidupan.

- Penggunaan jasa satelit komunikasi di samping telah mempercepat berkembangnya globalisasi informasi, juga bagi Indonesia amat diperlukan bagi penyebaran informasi secara cepat dan merata ke seluruh penjuru nusantara.

- Bangsa Indonesia perlu diupayakan agar mampu menumbuhkan dan mengembangkan sistem nilai bangsa yang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Pengembangan sistem nilai yang demikian itu tetap dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila, sehingga proses modernisasi di Indonesia benar-benar merupakan proses aktualisasi diri bangsa Indonesia sesuai dengan tuntutan jaman dengan tetap memperhatikan pentingnya nilai-nilai identitas nasional dan kepribadian bangsa.

- Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah bagaimana merekapnya pergeseran nilai jaman sehingga bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri universal dari bangsa yang modern namun tetap memperhatikan nilai khas dari kepribadian dan latar belakang kebudayaan sendiri berlandaskan nilai-nilai dasar Pancasila dalam membing ketahanan nasional dan wawasan nusantara.

- Indonesia memperjuangkan terciptanya "The New World Information and Communication Order (NWICO)".

Menghadapi masalah "free flow of information", disamping upaya-upaya ke dalam, pemerintah Republik Indonesia juga menempuh jalur internasional. Bersama dengan negaranegara berkembang lainnya, Indonesia memperjuangkan terciptanya "The New World Information and Communication Order" melalui berbagai forum internasional antara lain PBB, UNESCO, Gerakan Non Blok, OKI dan sebagainya.